

BUPATI KAMPAR BUKA MUSRENBANG SUSUN RKPD 2023



Sumber gambar: https://www.indofakta.com/news_18613.html

Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kampar tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKPD 2023 di aula rumah Dinas Bupati Kampar, Senin.

"Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar 2023 adalah wadah musyawarah yang melibatkan seluruh *stakeholder* Kabupaten Kampar untuk merumuskan lebih lanjut rancangan RKPD berdasarkan usulan Musrenbang Kecamatan, pokok pikiran DPRD Kabupaten Kampar, rancangan kerja perangkat daerah dan hasil forum gabungan perangkat daerah," jelasnya.

Hasil akhir tahapan perencanaan ini adalah dokumen RKPD 2023 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Kampar dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan verifikasi rencana kerja perangkat daerah yang harus mengacu pada program prioritas yang tertuang dalam dokumen RKPD 2023.

Dijelaskannya, tema pembangunan Kabupaten Kampar 2023 adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk mempercepat peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat, penguatan struktur perekonomian dan daya saing daerah dalam kondisi kehidupan normal yang baru.

"Kepada seluruh OPD saya berharap agar dalam menyusun program kegiatan dapat mempedomani tema tersebut, untuk hasil yang berkualitas tak terlepas dari perencanaan yang matang," pintanya.

Dia juga mengharapkan Musrenbang ini mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif dan akuntabel, sehingga bermuara pada tercapainya dokumen perencanaan yang semakin berkualitas.

Dia juga berpesan agar forum strategis pada hari ini dapat dimanfaatkan secara maksimal serta menjadi ruang diskusi konstruktif dalam melahirkan berbagai gagasan solutif untuk menjawab berbagai isu strategis pembangunan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Kampar, Ardi Mardiansyah juga ketua panitia, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya Musrenbang ini adalah untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Riau dan prioritas pembangunan nasional dan juga mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Kampar pada Musrenbang Kecamatan.

Dalam usulan pembangunan tahun 2023 yang telah diinput pada sistem informasi pemerintah daerah yakni usulan aspirasi masyarakat hasil musrenbang kecamatan berjumlah 1.609 usulan dan usulan pokok pikiran hasil reses DPRD Kabupaten Kampar berjumlah 1.069 usulan.

Narasumber pada Musrenbang ini adalah Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/BAPPENAS RI, Direktur perencanaan evaluasi dan informasi pemerintah daerah Kemendagri RI, Ketua DPRD Kabupaten Kampar serta Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau.

Rangkaian acara di akhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar 2023.

Sumber Berita:

1. <https://riau.antaranews.com/berita/272521/bupati-kampar-buka-musrenbang-susun-rkpd-2023>, tanggal 21 Maret 2022.
2. <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/22/03/2022/269776/hadirkan-perencanaan-pembangunan-efisien.html>, tanggal 22 Maret 2022.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Prinsip perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan

dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana rancangan awalnya disusun oleh Bappeda, kemudian Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD. Isi rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Rancangan RKPD akan menjadi bahan Musrenbang RKPD, Musrenbang RKPD sendiri merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya. Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan. Sementara Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan antar-Rancangan Renja SKPD dan antarRKPD kabupaten/kota dalam dan antar provinsi. Musrenbang RKPD kabupaten/kota dimulai dari Musrenbang desa atau sebutan lain/kelurahan, dan kecamatan atau sebutan lain, Musrenbang pada tingkat kabupaten/kota difasilitasi oleh pemerintah provinsi.

Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju, kemudian Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri. RKPD sendiri nantinya akan dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.